

**ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN
MELALUI MEDIASI
(Studi Pada Kantor Pertanahan Kota Medan)**

ABSTRAK

Syahputra *
Dr. Ibnu Affan S.H.M.Hum**
Prof. Dr. Marzuki, SH., M.Hum***

Tanah memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena tanah menjadi suatu kebutuhan yang pokok pada kehidupan manusia. Dalam kehidupan manusia sehari-hari sering terjadi perselisihan dan terjadi pertumpahan darah yang disebabkan oleh sengketa tanah, hal ini diketahui berawal dari adanya keberatan suatu hak atas tanah, mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa pertanahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum penyelesaian tanah secara mediasi di Kantor Pertanahan Kota Medan, bagaimana prosedur penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur mediasi di Kantor Pertanahan Kota Medan, bagaimana hambatan dalam proses mediasi di Kantor Pertanahan Kota Medan.

Penulisan tesis ini bersifat deskriptif dan pendekatan yang dipergunakan adalah yuridis normative dan didukung data yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Alat pengumpul datanya adalah studi dokumen dan wawancara serta dianalisis secara kualitatif.

Pengaturan hukum penyelesaian tanah secara mediasi di Kantor Pertanahan Kota Medan berpedoman pada Keputusan Kepala BPN RI No. 34 tahun 2007 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi yang memberikan arahan langkah-langkah upaya penanganan dan penyelesaian masalah pertanahan. Prosedur penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur mediasi di Kantor Pertanahan Kota Medan adalah dilakukan memanggil para pihak secara terpisah untuk mengetahui kemauan masing-masing pihak. Setelah pemanggilan pihak secara terpisah melakukan pengecekan data baik data fisik maupun data yuridis. Dari data tersebut kemudian Kantor Pertanahan menemukan kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan dengan dijelaskan dan diarahkan oleh mediator.

Berdasarkan pembahasan disimpulkan bahwa hambatan dalam proses mediasi di Kantor Pertanahan Kota Medan adalah ketidakhadiran para pihak yang bersengketa, tidak ada iktikad baik dari masing-masing pihak yang bersengketa. Upaya mengatasi hambatan adalah mengupayakan proses mediasi lebih dari satu kali.

Kata Kunci: Sengketa, Pertanahan, Mediasi,

Mahasiswa Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

**Dosen Pembimbing I Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

***Dosen Pembimbing Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

**JURIDICAL ANALYSIS OF LAND DISPUTE SETTLEMENT
THROUGH MEDIATION
(Study at the Medan City Land Office)**

Syahputra *
Dr. Ibnu Affan S.H.M.Hum**
Prof. Dr. Marzuki, SH., M.Hum***

ABSTRACT

Land has a very important meaning in human life, because land is a basic need in human life. In everyday human life there are often disputes and bloodshed caused by land disputes, this is known to originate from an objection to a land right, mediation is expected to be able to resolve land disputes in accordance with applicable regulations. The formulation of the problem in this study is how to regulate the legal settlement of land by mediation at the Medan City Land Office, what are the procedures for settling land disputes through mediation at the Medan City Land Office, what are the obstacles in the mediation process at the Medan City Land Office.

The writing of this thesis is descriptive in nature and the approach used is normative juridical and supported by empirical juridical data. The aim is to analyze the problem by combining legal materials (which are secondary data) with primary data obtained in the field. The data collection tools were document studies and interviews and were analyzed qualitatively.

The legal arrangements for land settlement by mediation at the Medan City Land Office are guided by the Decree of the Head of BPN RI No. 34 of 2007 concerning the Mechanism for the Implementation of Mediation which provides direction for steps in efforts to address and resolve land issues. The procedure for settling land disputes through mediation at the Medan City Land Office is to call the parties separately to find out the wishes of each party. After summoning the parties separately to check the data, both physical data and juridical data. From this data, the Land Office found both parties to resolve the problem by being explained and directed by the mediator.

Based on the discussion it was concluded that the obstacles in the mediation process at the Medan City Land Office were the absence of the disputing parties, there was no good faith from each of the disputing parties. The effort to overcome obstacles is to seek the mediation process more than once.

Keywords: Dispute, Land, Mediation,

**Students of the Postgraduate Law Program at the Islamic University of North Sumatra.*

***Supervising Lecturer II of the Law Program at the Islamic University of North Sumatra*

****Supervising Lecturer II of the Law Program at the Islamic University of North Sumatra*